

BAB III

ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TIONGKOK BAGI AUSTRALIA:

OFFENSIVE CAPABILITY & OFFENSIVE INTENTION

Setelah menganalisis mengenai tingkat ancaman Tiongkok bagi Australia melalui faktor *Aggregate Power* dan *proximity* di bab sebelumnya, bab ini akan membahas faktor selanjutnya mengenai analisis tingkat ancaman Tiongkok bagi Australia berdasarkan *offensive capability* dan *offensive intention*. Kedua faktor ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Tiongkok sebagai pengancam hegemoni Australia di kawasan memiliki kemampuan atas 2 hal tersebut. Hal ini tidak lepas dari dukungan pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia serta pengaruh politik yang telah Tiongkok capai hingga saat ini.

3.1 *Offensive Capability*

Offensive capability atau disebut juga *Offensive power*, yaitu negara dengan kemampuan militer yang besar/setara/mendekati dianggap paling berpotensi menjadi ancaman bagi hegemoni negara lainnya.

Offensive power. ...All else being equal, states with large offensive capabilities are more likely to provoke an alliance than those who are either military weak or capable only of defending (Walt, 1985, p. 11).

Kemampuan untuk menyerang adalah ketika di mana sebuah negara dengan kemampuan yang besar untuk melakukan serangan, dengan ditunjang oleh kemampuan militer sehingga membuat negara lain merasa terancam. Dalam hal ini, Tiongkok sebagai sebuah negara memiliki kemampuan atas hal tersebut berdasarkan kepemilikan atas kekuatan militer yang besar.

Di bawah adalah tabel kekuatan persenjataan militer di antara kedua negara.

Tabel 3. 1 Persenjataan Militer Tiongkok – Australia

Perbandingan Persenjataan Militer		Tiongkok	Australia
Persenjataan Darat	Combat Tanks	13,050	66
	Armored Fighting Vehicles	40,000	3,050
	Self-Propelled Artillery	4,000	0
	Towed Artillery	6,246	54
	Rocket Projectors	2,050	0
Persenjataan Udara	Fighters	1,222	78
	Attack	1,564	78
	Transport	193	39
	Trainers	368	162
	Total helicopter strength	1,004	157
	Attack helicopters	281	22
Persenjataan Laut	Aircraft carriers	1	2
	Frigates	52	10
	Destroyers	33	2
	Corvettes	42	0
	Submarines	76	6
	Patrol vessels	192	13
	Mine warfare	33	6

Sumber: (GFP, 2019)

Dapat dilihat pada Tabel 3.1 di atas, terdapat perbedaan yang cukup besar terhadap kekuatan persenjataan militer yang dimiliki oleh Tiongkok terhadap Australia. Dengan 3.187 peralatan militer udara, 700-an lebih peralatan militer laut dan peralatan angkatan darat yang lebih dari sepuluh kali lipatnya Australia, sudah lebih dari cukup untuk Australia mengantisipasi segala aktivitas Tiongkok di kepulauan Fiji.

Kepemilikan terhadap peralatan militer yang besar ini karena Tiongkok juga didukung oleh alokasi dana pertahanan yang besar tiap tahunnya (lihat Tabel 1.3). Berkaca dari sejarah yang terjadi, sebelumnya Tiongkok adalah negara yang bahkan pernah dijajah oleh tetangganya sendiri yaitu Jepang pada masa Manchuria, hal ini menimbulkan luka yang pada akhirnya dipercaya memacu

Tiongkok untuk memperbesar kemampuannya dalam berbagai bidang baik itu ekonomi, sosial hingga kemiliteran (Gries, Zhang, Masuki, & Lee, 2008, p. 263).

3.1.1 Pengalaman Konflik Militer Kedua Negara Dalam 100 Tahun Terakhir

Australia dan Tiongkok juga sama-sama berpengalaman dalam hal konflik peperangan dan memiliki sejarah yang cukup matang dalam perang berskala internasional. Hal ini dibuktikan dalam 100 tahun terakhir di mana ada beberapa konflik peperangan yang melibatkan kedua negara baik sebagai sesama aliansi atau sebagai musuh di medan perang.

Beberapa konflik peperangan yang dialami oleh kedua negara dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Konflik dan perang yang diikuti Australia-Tiongkok dalam 100 tahun terakhir

Konflik Australia dalam 100 tahun terakhir	Konflik Tiongkok dalam 100 tahun terakhir	Hubungan (Aliansi/Musuh, Tidak berhubungan)
Perang Dunia ke-1 (1914-1918)	Perang Sipil Tiongkok (1927-1950)	Tidak berhubungan
Perang Dunia ke-2 (1939-1945)	<i>Battle of Chamdo</i> (1950)	Tidak berhubungan
Perang Korea (1950-1953)	Perang Korea (1950-1953)	Musuh
Perang Vietnam (1965-1973)	Perang Vietnam (1965-1973)	Musuh
Perang Teluk (1990-1991)	Konflik Sino-Vietnam (1979)	Tidak berhubungan
<i>Operation Ocean Shield</i> (2009-2016)	<i>Operation Ocean Shield</i> (2009-2016)	Aliansi
<i>Terror</i> (2001-sekarang)	<i>War on Terror</i> (2001-sekarang)	Aliansi

Sumber: (List of war, 2013).

Dapat dilihat pada tabel di atas, Tiongkok dan Australia merupakan negara yang telah memiliki relasi perang dan konflik militer dalam 100 tahun terakhir.

3.1.2 Kecakapan *People Liberation Army (PLA)* Tiongkok Dalam Militer Global

PLA atau *People Liberation Army* atau yang dikenal dengan Tentara Pembebasan Tiongkok merupakan tentara nasional Tiongkok yang langsung berada di bawah komando Partai Komunis Tiongkok (PKC). PLA saat ini mengalami perkembangan baik secara internal dengan alokasi dana pertahanan yang besar dan juga secara eksternal dengan meningkatkan kerja sama militer asing demi menunjukkan kekuatan militer Tiongkok. PLA sendiri saat ini meningkatkan diplomasi ke setidaknya 110 negara dengan menjadi penasihat di bidang militer bagi kedutaan Tiongkok di berbagai negara tersebut (DIA, 2019, p. 19).

PLA yang bertugas di berbagai negara ini memungkinkan untuk mempelajari struktur komando asing, unit formasi dan pelatihan operasional dari negara tersebut. Selain dari mengirimkan perwakilan ke berbagai negara, PLA sendiri juga rutin mengirimkan pertukaran petugas untuk latihan tanding militer bersama agar dapat semakin meningkatkan hubungan secara militer yang telah terjalin. Perkembangan dan modernisasi PLA dalam strategi militer menjadi ancaman tersendiri bagi berbagai militer di dunia khususnya dari blok barat sekaligus memperkuat pengaruh Tiongkok di mata negara-negara berkembang.

PLA juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk diaspora Tiongkok yang tumbuh di kawasan Pasifik Selatan. Mengingat potensi kerusuhan antar etnis yang berbeda sangat besar terjadi di kawasan, dapat menjadi pembenaran bagi militer Tiongkok dalam mengerahkan PLA untuk memberikan

perlindungan bagi warga negaranya di negara-negara yang terdapat di kawasan Pasifik Selatan (Maclellan, 2018).

PLA melalui sebuah perusahaan di Tiongkok bernama CESEC (*Electronic Systems Engineering*), membayar perusahaan milik Tonga Royal Princess bernama Tomasat untuk mengizinkan satelit Tiongkok berada di kawasan langit kerajaan polinesia (Hille, 2019). PLA juga berupaya membangun landasan angkatan laut militer di wilayah Vanuatu untuk mempermudah berbagai operasi militer di wilayah tersebut, namun pembangunan militer ini ditutupi dengan alasan pembangunan pangkalan logistik (Gershaneck, 2018). Hal ini merupakan bentuk kemampuan dari PLA untuk dapat menanamkan militernya di kawasan Pasifik Selatan, dan dapat dikatakan hal ini menjadi ancaman bagi Australia sebagai sekutu Amerika Serikat sekaligus penjaga kawasan regional Pasifik Selatan.

3.1.3 Kemampuan Tiongkok Dalam Menjalin Kerja Sama Militer

Selain dari konflik dan peperangan, Tiongkok juga pernah dan saat ini masih mengikuti beberapa kerja sama kemiliteran yang melibatkan lebih dari satu negara. Kerja sama militer ini dapat berupa organisasi maupun pelatihan militer yang dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan dan pertahanan antar anggota di dalamnya. Kerja sama militer ini juga berpengaruh besar dalam *offensive capability* yang bisa dijadikan Australia sebagai patokan dalam mengukur kekuatan dan kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok apabila bersaing pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Beberapa organisasi dan kerja sama militer yang telah diikuti Tiongkok antara lain adalah *Shanghai Cooperation Organisation* dan UN PKO (*United National Peace Keeping Operations*) (Singh, 2011, pp. 796-800).

Organisasi Kerja Sama Shanghai atau SCO (*Shanghai Cooperation Organisation*) digambarkan sebagai saingan NATO dan merupakan organisasi antarbangsa di wilayah Asia yang beranggotakan Tiongkok, Kazahktan, Kirgiztan, Rusia, dan beberapa negara lainnya yang bertujuan untuk keamanan dan kerja sama lanjutan baik ekonomi, sosial dan budaya (Haas, 2011, p. 15). Organisasi SCO ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam bidang kerja sama militer antarbangsa, dengan adanya kerja sama militer yang besar dan kuat ini maka Tiongkok dapat memiliki kekuatan menjadi pelindung kawasan dan menarik dukungan dari negara-negara di Pasifik Selatan.

Sedangkan PKO merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh PBB untuk membentuk tentara-tentara yang berasal dari berbagai negara yang dapat diturunkan ke berbagai wilayah konflik di dunia untuk menjaga perdamaian (UN, 2019). Tiongkok berkomitmen mengirimkan 8.000 anggota yang bertugas sebagai tentara penjaga perdamaian di UNPKO dan siap diterjunkan dalam berbagai wilayah konflik. Hal yang menjadi penilaian dari keterlibatan Tiongkok dalam UNPKO ini adalah bahwa militer Tiongkok telah siap dalam mengatasi berbagai kemungkinan konflik yang dapat terjadi.

Dengan *offensive capability* yang Tiongkok miliki dan tunjukkan, maka Tiongkok memiliki kemungkinan besar untuk melakukan kegiatan yang bisa mengarah ke provokasi lebih lanjut untuk menantang pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini sesuai dengan kecenderungan negara-negara yang memiliki kemampuan ofensif yang lebih besar untuk memprovokasi negara lain yang bertentangan (Walt, 1985, p. 11). Hal lain yang perlu diantisipasi oleh Australia adalah berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan yang dibangun oleh

Tiongkok terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik Selatan secara perlahan akan melunturkan kepatuhan negara tersebut terhadap Australia yang telah ada selama ini.

3.2 *Offensive Intention*

Walt mendefinisikan *offensive intentions* sebagai adanya niat dari negara sumber ancaman yang terlihat bertindak agresif dalam penyebaran pengaruh, cenderung memprovokasi yang lain dengan berbagai kebijakan-kebijakan agresif sehingga seringkali menimbulkan gesekan kepentingan di antara keduanya.

Offensive Intentions. ...Finally, states that appears aggressive are likely to provoke others to balance against them. As I noted earlier, Nazy Germany provoked an overwhelming coalition against itself because it combined substantial power with extremely offensive ambitions. Indeed, even states with rather modest capabilities may trigger a balancing response if they are perceived as especially aggressive (Walt, 1985, p. 12).

Dalam hal ini Tiongkok sebagai sumber ancaman atas hegemoni Australia di kawasan Pasifik Selatan telah melakukan berbagai hal yang dapat dianggap sebagai kegiatan dengan niat memprovokasi Australia. Kegiatan-kegiatan ini menjadi tolok ukur Australia dalam melihat perilaku agresif Tiongkok, karena menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan *offensive capability*.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Tiongkok di beberapa negara di kawasan yang menunjukkan adanya niatan untuk bersikap ofensif di antaranya adalah:

3.2.1 Upaya pendanaan Tiongkok atas kamp militer Blackrock di Fiji

Tiongkok berupaya untuk menjalin kerja sama di bidang militer dengan Fiji, seperti yang pernah disebutkan oleh duta besar Tiongkok bagi Fiji yang secara terbuka siap membantu mendirikan pangkalan angkatan laut baru. Tiongkok juga menyumbangkan kapal pengintai jenis terbaru bernama Yuanwang-7, 50 unit

kendaraan polisi dan kerja sama pelatihan bersama antar polisi kedua negara di Fiji (Riordian, 2018).

Salah satu proyek kerja sama militer lain yang sempat ditawarkan oleh Tiongkok yaitu kerja sama terkait pembiayaan *Blackrock Camp Military* yang terdapat di Fiji. Kerja sama ini disampaikan oleh juru bicara Tiongkok yang terdapat di Fiji adalah upaya asli di bawah kerja sama Selatan-Selatan dengan bertujuan membantu negara-negara pulau mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran tanpa ada keinginan menargetkan pihak lain (Chinese Embassy spokesperson criticizes Australian media reports regarding the Black Rock Camp project, 2018). Hal ini memicu pihak Australia untuk turut campur dalam merebut proyek kerja sama pembangunan kamp militer ini, mengingat jika ini proyek ini berhasil didapatkan oleh Tiongkok, dengan asumsi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap keamanan kawasan menjadi semakin besar.

Persaingan untuk bekerja sama dalam mendanai proyek *Blackrock camp* ini akhirnya dimenangkan oleh Australia setelah menawarkan pendekatan yang lebih secara holistik/menyeluruh dalam proposal pendanaan dibandingkan dengan Tiongkok yang terkesan hanya menawarkan bantuan terpisah dan sepotong-sepotong (Mudaliar, 2018). Dengan klaim yang sama seperti yang disebutkan oleh Tiongkok, kerja sama yang terjalin antara Australia-Fiji dalam MoU *Blackrock camp* merupakan pivot strategis bagi Australia untuk terus berinvestasi ke kawasan regional demi tercapainya perdamaian, kemakmuran dan stabilitas melalui kemampuan pertahanan yang mumpuni (Kuper, 2019).

Setelah mengamankan kamp militer Blackrock, Australia menunjukkan perhatian lebih lanjut terhadap keamanan kawasan regional dan meningkatkan

keamanan perairan di Fiji dan sekitarnya. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya *Join Boarding Operation* antara angkatan laut Australia-Fiji dengan tujuan kerja sama ini untuk menjaga domain maritim bersama (Daily , 2018). Pelatihan bersama angkatan laut ini juga disaksikan oleh negara-negara lain seperti Kamboja, Tonga, Timor Leste dan Tuvalu yang berdampak menegaskan kembali pengaruh Australia sebagai penjaga stabilitas dan keamanan regional.

3.2.2 Belt Road Initiative(BRI)

Belt Road Initiative atau BRI merupakan strategi pembangunan yang diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 di bawah pemerintahan Xi Jinping, untuk menghidupkan kembali jalur sutra perdagangan Tiongkok di masa lampau. BRI berfokus pada konektivitas dan kerja sama yang dibangun sekaligus menghubungkan Tiongkok dengan Eropa, Eurasia, Afrika, Samudera Hindia dan pasifik. BRI merupakan proyek yang krusial untuk Tiongkok, mengingat BRI dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama strategis dalam infrastruktur, investasi dan bisnis dengan 65 negara lain yang secara kolektif mencakup 75% cadangan energi yang di ketahui, 62% populasi, dan lebih dari 30% produk domestik bruto global (Litelnoni, 2019).

Namun kritikan muncul terhadap proyek BRI ini, di mana Tiongkok sebagai negara dengan keuangan yang besar menggunakan kelebihan tersebut untuk mendominasi negara dengan ekonomi yang kecil. Dengan menggunakan iming-iming bantuan ekonomi dan pinjaman lunak, Tiongkok dapat mengontrol infrastruktur, SDA dan aset-aset penting dari negara kecil tersebut (Wade, 2016).

Tiongkok juga melakukan upaya-upaya untuk memperluas BRI dengan menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Selandia baru, Vanuatu, Fiji, Cook, Samoa, Tonga dll. Upaya ini dilakukan secara perlahan oleh Tiongkok melalui berbagai bantuan ekonomi dan pinjaman lunak jangka panjang. Pada akhirnya upaya ini mulai menunjukkan hasil seperti dibangunnya pelabuhan perairan di Pulau Penhryn di Cook, jalan Tol sepanjang 64 km dan dermaga di Niue. Negara Tonga juga mendapat keringanan pembayaran hutang awal sebesar 65 juta USD dengan catatan hutang tersebut bertambah dengan bunganya menjadi 115 juta USD pada saat jatuh tempo kedepan (Ellis & Devonshire, 2019). Untuk Fiji sendiri, Tiongkok selain menawarkan bantuan pinjaman lunak juga melakukan investasi yang cukup besar terutama dalam infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata di sekitar pulau-pulau yang terdapat di Fiji.

Tabel 3. 3 Nilai Bantuan Investasi terkait Belt Road Initiative (BRI) Tiongkok di Kepulauan Pasifik

Nomor	Negara	Nilai Bantuan Investasi dari Tiongkok (Kumulatif 2006-2016)
1	Fiji	359,8 juta USD & 37 proyek infrastruktur
2	Vanuatu	243,48 Juta USD & 25 proyek infrastruktur
3	Samoa	230 juta USD & 36 proyek infrastruktur
4	Tonga	172 juta USD & 35 proyek infrastruktur
5	Kepulauan Cook	49,8 juta USD & 13 proyek infrastruktur

Sumber: (Bran & Jiawei, 2016)

Secara garis besar negara-negara yang disebutkan di atas turut membantu melancarkan jalannya proyek BRI yang dimiliki oleh Tiongkok di wilayah Kepulauan Pasifik dengan menyetujui berbagai pembangunan yang dilakukan

oleh Tiongkok di dalam negeri masing-masing. Padahal secara jelas negara-negara tersebut selama ini berada di bawah komando Amerika Serikat melalui perpanjangan tangan Australia.

Tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai oleh Tiongkok dengan berupaya membangun kamp militer Blackrock di Fiji juga adalah demi melancarkan jalannya BRI itu sendiri. Terlepas dari berbagai interpretasi baik yang diberikan seseorang terhadap proyek BRI, upaya Tiongkok bekerja sama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik terus mengalami peningkatan. Dan di bawah proyek BRI sejauh ini memperjelas keterikatan ekonomi yang kuat terbangun diantara Tiongkok-Pasifik Selatan. Hal ini mau tidak mau memaksa Australia untuk kembali memperkuat hubungan yang dibangun dengan negara-negara tersebut, mengingat BRI adalah salah satu bentuk *offensive intentions* Tiongkok di negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang menjadi salah satu jalur maritim internasional dan memiliki sumber daya alam dan laut yang potensial.

3.2.3 RAMSI, peran Australia dalam politik dalam negeri Solomon dan pengaruh Tiongkok

RAMSI (*Regional Assistance Mission to Solomon Island*) merupakan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia untuk mengatasi konflik etnis yang terjadi di Kepulauan Solomon pada rentang waktu 1998-2003. Awalnya, permohonan permintaan bantuan yang diajukan oleh Ulufa'alu selaku Perdana Menteri Kepulauan Solomon tidak dipedulikan oleh Australia karena hal tersebut dilihat sebagai problematika dalam negeri yang harus diselesaikan oleh pemerintah Solomon sendiri.

Namun pada tahun 2003, di bawah keputusan John Howard Australia merubah kebijakannya dan bersedia memimpin pasukan untuk mengintervensi konflik yang terjadi karena ketidakmampuan Pemerintah Solomon. Australia membentuk RAMSI di bawah naungan PIF dan didukung oleh beberapa negara seperti Selandia Baru, Fiji, PNG, Samoa, Vanuatu, dan lainnya (Hoadley, 2005, p. 10). Perubahan keputusan Australia di bawah Howard ini karena ketidakamanan yang terjadi di Kepulauan Solomon akan berdampak merugikan kepentingan Australia dalam hal keamanan. Hal ini karena keamanan Australia membutuhkan kawasan yang stabil dan negara-negara di sekitarnya haruslah bebas dari konflik sehingga tidak memunculkan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang ada di dalamnya.

Selain itu, berdasarkan pandangan dalam liberal bahwa akan lebih mudah menjalin hubungan kerja sama dengan negara yang memiliki ideologi yang sama, dengan acuan ini maka kudeta di Solomon perlu diberantas dan itu merupakan tugas Australia sebagai *order of domestic politic* dalam menyebarkan demokrasi di kawasan. Dalam kebijakan ini Australia mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi konflik etnis dan memperkuat institusi pemerintahan di Kepulauan Solomon sehingga tidak terjadi lagi konflik berkelanjutan (Holland & McDonald, 2010, pp. 6-7).

Kondisi Rapuh yang di alami oleh Kepulauan Solomon selama konflik kemudian dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan kedatangannya dengan maksud untuk memuluskan kebijakan '*One China Policy*' di Kepulauan Solomon. Tiongkok hadir memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan Solomon dengan maksud untuk menekan Taiwan, namun bantuan ekonomi yang diberikan

tidak mampu menyelesaikan konflik dan malah memperburuk keadaan wilayah tersebut karena korupsi yang terjadi malah semakin meningkatkan perpecahan antar penduduk.

Pada dasarnya negara-negara di Pasifik Selatan memiliki kondisi perekonomian yang lemah, dan hal ini menjadi celah untuk dimanfaatkan dalam persaingan politik negara-negara lain dalam bersaing pengaruh. Politik-politik berupa bantuan ekonomi yang ditawarkan Tiongkok malah justru memperparah keadaan di Kepulauan Solomon dan berpotensi sebagai jebakan hutang (Febriani, 2018, pp. 15-17). Keinginan Tiongkok untuk memuluskan *'One China Policy'* di Kepulauan Solomon dengan bantuan berbagai paket ekonomi, malah menjadikan negara tersebut lemah dan rawan konflik sehingga Australia perlu mengambil sikap seperti yang ditunjukkan dalam RAMSI.

3.2.4 Tiongkok berupaya membangun pangkalan militer di Vanuatu

Tiongkok juga mulai mendekati Vanuatu dalam hal membangun kerja sama militer yang bersifat permanen di negara kepulauan tersebut. Jika kerja sama ini disetujui oleh kedua belah pihak dan berhasil dilaksanakan, maka akan ada sebuah pangkalan militer yang berjarak hanya sekitar 2000 kilometer dari lepas pantai negara Australia (Wroe, 2018). Upaya untuk mendapatkan kerja sama ini berpeluang memiliki keberhasilan untuk dijalankan mengingat Tiongkok telah mengeluarkan ratusan juta dollar untuk membantu pemerintah Vanuatu.

Tiongkok selain ingin memproyeksikan kemampuannya dengan berbagai bantuan ekonomi, pinjaman lunak dan pembangunan infrastruktur tetapi juga ingin memproyeksikan kekuatan militernya sehingga negara seperti Vanuatu

merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan bekerja sama dengan negara yang baik dan kuat.

Upaya kerja sama yang dibangun Tiongkok-Vanuatu ini, membuat Menteri Luar Negeri Australia saat itu yaitu Julie Bishop bersama pangeran Charles mengambil inisiatif berkunjung ke Vanuatu. Kunjungan ini untuk menunjukkan manfaat dari komitmen Persemakmuran terhadap Vanuatu dan menekan pengaruh Tiongkok agar tidak semakin melebar. Karena berapapun kecilnya peluang pendirian angkatan laut Tiongkok di Vanuatu, akan mempengaruhi kebijakan pertahanan pemerintahan Australia hingga beberapa dekade kedepan (Chibarirwe, 2018).

3.2.5 Intervensi tidak langsung atas pemberlakuan sanksi Kudeta Militer di Fiji

Contoh lain dari *offensive intentions* Tiongkok adalah adanya upaya intervensi secara tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri Australia terhadap Fiji. Hal ini ditunjukkan dalam kasus perpolitikan internal Fiji yang seringkali mengalami kudeta yang dilakukan oleh pihak militer kepada pemerintah resmi yang berjalan. Perebutan paksa dalam kekuasaan yang dilakukan oleh militer di Fiji, seharusnya merupakan konflik internal negara Fiji. Namun sama halnya dengan kasus RAMSI di Kepulauan Solomon, Australia sebagai negara yang berusaha menyebarkan sistem demokrasi di seluruh negara yang ada di Kepulauan Pasifik Selatan menganggap hal ini adalah sebuah kesalahan dan berprioritas mengancam stabilitas kawasan sehingga Australia sering mengirimkan tentara untuk menstabilkan perpolitikan di Fiji paska kudeta (Firth, 2005, p. 170).

Kejadian ini tidak lepas dari seringnya konflik etnis berkepanjangan yang terjadi di beberapa negara di Kepulauan Pasifik Selatan sehingga seringkali di kenal dengan julukan *the arc of instability* atau kawasan yang tidak stabil (Dibb, Hale, & Pince, 2006, p. 18). Jika ditarik dari studi kasus terbentuknya *Regional Assistance Mission to Solomon Island* (RAMSI) yang diprakarsai Australia pada tahun 2003 dan mendapat persetujuan di PIF. Maka upaya yang dilakukan oleh Australia untuk mengatasi konflik berkepanjangan di kepulauan Solomon sejak 1998 ini adalah untuk menunjukkan *Regional Powers* Australia terhadap kawasan Pasifik Selatan. *Regional Powers* sendiri merupakan upaya bagi sebuah negara untuk menjalankan kepemimpinan dalam lingkup regional asumsinya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian (Mulugeta, 2014, p. 7).

Kasus kudeta terakhir yang dapat menggambarkan *offensive intention* Tiongkok adalah kudeta yang terjadi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Frank Bainarama terhadap pemerintahan resmi Fiji (DW, 2006). Dengan pemberian sanksi oleh Australia berupa pemotongan bantuan, isolasi visa hingga ancaman pembekuan keanggotaan Fiji dari PIF, diharapkan agar pemerintahan di Fiji berjalan demokratis kembali (Gaglioti, 2009). Namun, Tiongkok justru mengambil kesempatan ini dengan mengisi kekosongan posisi sebagai pendonor bantuan bagi Fiji dan menjalin hubungan kerja sama lebih intens terhadap Fiji. Apapun hal yang terjadi di Fiji berimbas dalam pengambilan kebijakan luar negeri Australia.

Pemberian sanksi yang dilakukan oleh Australia kepada Fiji sebagai bentuk pengingat bahwa Australia peduli terhadap perkembangan demokrasi di Fiji karena itu adalah *concern* Australia dalam membantu negara-negara di kepulauan

Pasifik Selatan. Namun Pemerintah Tiongkok justru memberikan bantuan hibah langsung dengan alasan Fiji telah mendukung kebijakan *one china policy* kepada Bainarama yang justru memperpanjang nafas dari para pelaku kudeta di Fiji (Guixia , 2015).

Respon dari pemerintahan Fiji terhadap sanksi Australia dan tindakan dari Tiongkok adalah dengan mengeluarkan kebijakan '*look north policy*'. Kebijakan ini mengarahkan pandangan Fiji untuk tidak lagi terbatas hanya pada Australia, namun hubungan kerja sama yang dibangun juga bisa berpandangan pada negara-negara di wilayah utara termasuk di dalamnya Tiongkok (Komai, 2015, p. 113).

Tindakan-tindakan ini secara tidak langsung menggoyahkan posisi tawar menawar Australia di Fiji sekaligus menunjukkan upaya provokasi terhadap kebijakan luar negeri Australia di Fiji yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok juga secara tidak langsung menghambat upaya penyebaran demokrasi oleh Australia dengan cara memberi dukungan berupa sikap non-intervensi terhadap sistem pemerintahan hasil kudeta militer yang terjadi di Fiji, tidak mengindahkan upaya Australia-PIF mengisolasi Fiji dan mengubah kepatuhan Fiji terhadap Australia yang ditunjukkan dengan '*look north policy*'.

3.3 Strategi Jeratan Hutang Tiongkok

Dari 4 hal yang telah di sebutkan sebelumnya terkait adanya kemampuan berupa Aggregate Power, Proximity, Offensive Capability dan Offensive Intentions yang dimiliki oleh Tiongkok sehingga berpotensi dalam mengancam hegemoni Australia. Penulis akan menambahkan satu hal terkait kemampuan yang dimiliki Tiongkok dalam membuat negara-negara di Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan lainnya dapat tunduk pada pengaruh Tiongkok

tanpa sadar. Kemampuan tersebut adalah bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang berpotensi sebagai jebakan hutang.

Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Dengan dukungan sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, bantuan-bantuan berupa kucuran dana segar hingga pembangunan proyek infrastruktur vital yang ditawarkan sangat memberikan pengaruh bagi negara-negara yang menerima bantuan ekonomi Tiongkok tersebut. Namun, pepatah Tiongkok lama mengatakan ‘Tidak ada makan siang gratis di dunia ini’, dan hal ini juga berlaku dalam kasus bantuan ekonomi dan pinjaman lunak Tiongkok bagi negara-negara di Pasifik Selatan.

3.3.1 Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon (Solomon Island) merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di samudera pasifik dan digolongkan sebagai kawasan benua Oseania. Kepulauan Solomon terdiri atas 992 pulau, dengan ibukota yaitu Honiara yang terletak di pulau Guadalcanal.

Kepulauan solomon sebagai salah satu negara yang berada di Pasifik Selatan semakin meningkatkan hubungan diplomatik yang dibangun dengan Tiongkok. Hubungan diplomatik ini menjadi sinyal berkembangnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan dan hal tersebut untuk mempermudah dalam memantapkan kebijakan *One China Policy* di kawasan tersebut. Kebijakan ini membuat Kepulauan Solomon harus mengalihkan hubungannya secara keseluruhan dari Taiwan ke Tiongkok.

Kepulauan Solomon sendiri merupakan mitra dagang dari Tiongkok yang berperan dalam memasok beberapa sumber daya alam seperti sejumlah besar kayu dan ikan yang mana ini merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh Tiongkok sebagai sebuah negara industri yang besar sekaligus menjalin hubungan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Wesley-Smith, 2013, pp. 362-363). Kepulauan Solomon juga meneken sebuah perjanjian kerja sama dalam gagasan kebijakan unggulan luar negeri Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) sehingga kedepannya diharapkan meningkatkan perekonomian kedua negara (Andriana, 2019). Bantuan lain yang diterima oleh Kepulauan Solomon terkait dalam bidang ekonomi, yaitu pemberian bantuan sebesar 500 juta USD yang diharapkan dapat membantu pembangunan proyek dan infrastruktur di negara tersebut (Perdana, 2019).

Upaya-upaya dilakukan oleh Australia untuk membendung pengaruh Tiongkok di Kepulauan Solomon, seperti kunjungan Perdana Menteri Scott Morrison ke Kepulauan Solomon, meningkatkan bantuan ekonomi dan hibah dari Australia-Amerika Serikat hingga upaya pembangunan kabel telekomunikasi untuk mempermudah akses teknologi di negara tersebut (Rozi, 2019). Pembangunan kabel ini sendiri merupakan hasil dari tekanan diplomatik dan intervensi intelijen pemerintah Australia terhadap Kepulauan Solomon, karena Australia tidak menginginkan Kepulauan Solomon memberi jalan Huawei selaku perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok untuk melakukan pembangunan jaringan tersebut.

3.3.2 Pengaruh pebisnis Tiongkok dalam kebijakan dalam negeri Kepulauan Marshall

Kepulauan Marshall juga merupakan salah satu negara kecil yang terdapat di kawasan Kepulauan Pasifik yang mendapat perhatian Tiongkok. Sebagai salah satu negara yang termasuk dari 6 negara di Pasifik Selatan yang dikenal mendukung Taiwan, Kepulauan Marshall menjadi target Tiongkok untuk memuluskan kebijakan *One China Policy*. Berbagai kegiatan dilakukan Tiongkok dalam menjalin hubungan yang lebih baik dan dekat dengan Marshall dengan maksud memenangkan hati dari pemerintah Marshall dan mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan dan menolak Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat.

Pengaruh pebisnis Tiongkok juga dapat dilihat dalam kebijakan internal pemerintah Kepulauan Marshall. Pemerintahan yang berjalan di Kepulauan Marshall, di mana pada tahun 2018 sempat mengalami pertentangan pada saat pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi negara tersebut. Kebijakan tersebut terkait pengadopsian mata uang krypto/ *cryptocurrency* agar memiliki dasar hukum dan dapat digunakan di dalam negeri. Namun, kebijakan ini mendapat tentangan dan kritikan dari beberapa senator yang di anggap terhubung dengan beberapa pebisnis Tiongkok yang menganggap keputusan tersebut beresiko merugikan pebisnis Tiongkok tersebut. Penentangan ini ditanggapi oleh Presiden Hilda Heine selaku eksekutif tertinggi Kepulauan Marshall sebagai akibat dari pengaruh Tiongkok yang sudah terlalu jauh tumbuh di Kepulauan Pasifik, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan perpolitikan dalam negeri (Guardian, 2018).

3.3.3 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Kepulauan Cook

Tiongkok menjalin hubungan diplomasi dengan Kepulauan Cook sejak tahun 1997. Meski hubungan ini sempat mendapat kritikan, namun pemerintah Kepulauan Cook tetap aktif dalam menerima bantuan ekonomi dari Tiongkok. Kepulauan Cook juga merupakan salah satu negara yang mendapat bantuan berupa hibah ekonomi dan pembangunan infrastruktur dari Tiongkok. Sejak tahun 2006 hingga 2013 Tiongkok telah memberikan bantuan ekonomi sebesar 33 juta USD kepada Kepulauan Cook lebih besar daripada Australia yang hanya sekitar 26,8 juta USD. Tiongkok juga membantu pembangunan proyek infrastruktur dalam bidang agrikultur, perikanan, pemerintahan dan masyarakat sipil hingga pendidikan (Brant, *Chinese Aid in the Pacific: Cook Island Snapshot*, 2015). Tindakan ini untuk menunjukkan bahwa Tiongkok adalah mitra kerja sama yang baik di mata Kepulauan Cook dan negara kecil lain di sekitarnya.

Salah satu program pertama yang di jalankan oleh Tiongkok di Kepulauan Cook adalah Proyek Te Mato, yaitu proyek untuk meningkatkan pasokan air bersih ke pulau Rarotonga yang berada di Kepulauan Cook yang dijalankan oleh 3 negara yaitu Tiongkok-Selandia Baru-Kepulauan Cook (Zhang, 2015). Proyek pembangunan ini merupakan salah satu dari berbagai bantuan ekonomi dan infrastruktur yang ditawarkan oleh Tiongkok. Namun, yang menjadi pokok persoalan adalah semuanya merupakan bentuk dari pinjaman lunak yang diberikan oleh Tiongkok kepada Cook Island dan tetap harus dibayar pada saat jatuh tempo. Tidak hanya konsekuensi terbatas pada pembayaran hutang, namun juga hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan proyek infrastruktur didapatkan oleh para pebisnis dari Tiongkok (Hannan & Firth, 2015, pp. 879-880).

Hal yang ditakuti dan menjadi efek jangka panjang dari ketidakmampuan membayar hutang ini kedepannya adalah munculnya konflik di dalam negeri dari Kepulauan Cook. Konflik ini akan muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak bisa membayar hutang sehingga harus jatuh ke dalam jeratan Tiongkok. Efek selanjutnya secara pasti adalah ketidakstabilan negara yang berimbas pada ketidakstabilan keamanan kawasan dan membahayakan keamanan dari Australia sebagai pihak yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kawasan.

3.3.4 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Samoa

Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Samoa sejak tahun 1975 beberapa tahun setelah Samoa memperoleh kemerdekaan. Hubungan yang dibangun oleh Tiongkok di Samoa selain sebagai mitra kerja sama juga pernah memiliki tujuan untuk menekan pengaruh Uni Soviet di Pasifik Selatan pada masa Perang Dingin. Alasan Samoa memilih untuk lebih dekat kepada Tiongkok dibanding Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa itu adalah, karena Tiongkok dianggap sebagai kekuatan besar yang tidak langsung terlibat dalam konflik selama Perang Dingin, sehingga kemudian Samoa mengizinkan pembangunan Kedutaan Tiongkok di Apia ibukota negara Samoa (Wesley-Smith & Porter, 2010, pp. 152-154).

Hubungan kedua negara paska Perang Dingin semakin kuat terutama dalam penguatan ikatan sosial dan budaya dan Tiongkok kemudian juga memberikan bantuan di bidang peningkatan kesehatan, infrastruktur dan kerja sama perdagangan. Samoa sama seperti negara pembangunan pada umumnya juga menerima bantuan pinjaman lunak dari Tiongkok, dengan jumlah yang cukup

besar seperti pada rentang tahun 2006-2013 sebesar 145,6 juta USD. Dana ini dipergunakan untuk pembangunan sektor pemerintahan dan masyarakat sipil sebanyak 39%, Kesehatan sebanyak 29%, pendidikan 12% dan 20% sisanya pada berbagai sektor lain (Brant, 2015).

Wesley-Smith mengatakan dalam bukunya, bahwa kehadiran Tiongkok yang menguat di negara-negara Pasifik mempengaruhi serta mengurangi kekuatan pihak barat seperti Australia dan Amerika Serikat adalah hal yang lumrah. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah yang besar mengingat apa yang Tiongkok lakukan adalah membantu membangun infrastruktur dan meningkatkan sumber daya dan skill termasuk di Samoa.

To be sure, China's growing presence and influence may reduce the influence of Western powers in the region, particularly Australia and the United States. But why should this be regarded as problematic, given that there is a feeling that the islands have been neglected by their traditional allies? Moreover, China's increasing presence in the region has provided considerable infrastructural development and boosted resources and skill within many Pacific Island countries (Wesley-Smith T., 2013, p. 160).

Australia sebagai hegemoni di wilayah Pasifik merespon dengan kembali meningkatkan hubungan dengan Samoa yaitu memberikan bantuan ekonomi kepada Samoa. Sepanjang tahun 2006-2016 tercatat Australia memberikan bantuan sejumlah 242,6 juta USD, kemudian pada tahun 2016 juga Samoa menerima kunjungan 3 Menteri dan 1 Duta Besar Australia dengan maksud untuk merayakan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara (Likou, 2017). Program-program bantuan dan peningkatan seperti reformasi ekonomi dan pemerintahan, perbaikan infrastruktur sekolah berstandar universal, kemitraan kesehatan bertujuan peningkatan sumber daya medis, hingga beasiswa pendidikan diberikan oleh Australia dalam rangka mencerminkan bahwa hubungan Australia dengan Samoa semakin erat baik-baik saja (Australian Government, 2018).

3.3.5 Bantuan Ekonomi Tiongkok bagi Tonga

Tonga merupakan negara berpenduduk sekitar 104,000 jiwa yang awalnya menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1972, namun kemudian beralih menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1998. Tiongkok hadir di Tonga dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah hingga sebesar 172 juta USD (hampir mencapai 50% PDB Tonga) sejak 2006 hingga 2016, bantuan pinjaman lunak ini juga disertai dengan bantuan pembangunan infrastruktur terkait transportasi, kesehatan dan multi-sektor lainnya (Bran & Jiawei, 2016). Namun seperti halnya negara kecil lain di Pasifik Selatan, Tonga memiliki ketakutan akan ketidakmampuan membayar hutang kepada Tiongkok dan akhirnya malah akan terjerat sehingga Tiongkok malah akan diuntungkan pada akhirnya. Metode yang disebut pengamat dari Australia sebagai ‘perangkap hutang’ ini dimaksudkan untuk mendapatkan akses kendali terhadap titik-titik strategis yang terdapat di Tonga seperti pelabuhan, kamp militer dan infrastruktur vital lainnya. Australia sendiri telah membantu mengucurkan bantuan ekonomi sebesar 180 juta USD untuk membantu pembangunan di Tonga, sekaligus menahan laju pengaruh Tiongkok.

Tidak hanya bantuan ekonomi dan pinjaman lunak yang mengalir dari pemerintah Tiongkok ke Tonga, namun juga mengalir pendatang atau imigran dari Tiongkok terutama semenjak Pemerintah Tonga mulai menjual passport. Passport ini awalnya digunakan untuk menarik para pebisnis-pebisnis kaya Tiongkok, namun ternyata justru penduduk pedesaan Tiongkok yang menangkap kesempatan ini. Kedatangan imigran ini menimbulkan persaingan terhadap peluang kerja yang

cukup kecil di Tonga, bahkan penduduk lokal sudah merasa menjadi bagian dari penduduk Tiongkok itu sendiri (Perry, 2019).

Jika dilihat mungkin aliran imigran yang masuk ke Tonga ini dalam lingkup yang kecil hanya akan berpengaruh terhadap masyarakat Tonga sendiri, namun jika ini terus berlanjut maka tidak tertutup kemungkinan kedepannya Australia akan kehilangan pengaruhnya di Tonga karena semakin kuatnya pengaruh Tiongkok terhadap negara tersebut.

3.3.6 Bantuan ekonomi Tiongkok bagi Vanuatu

Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik dengan Vanuatu sejak tahun 1982. Namun Vanuatu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Serge Vohor pada tahun 2004 mengalihkan dukungannya kepada Taiwan, tetapi pada tahun 2011 kembali untuk mengakui Tiongkok di bawah kebijakan *One China Policy*. Vanuatu menggunakan diplomasi seperti ini untuk mendapat bantuan yang lebih dari Tiongkok, dan terhitung telah mendapat bantuan pinjaman lunak sebesar 243 juta USD serta proyek pembangunan infrastruktur, pelayanan jasa, transportasi dan pendidikan sepanjang tahun 2006 hingga 2016 (Brant, *Chinese Aid in the Pacific: Vanuatu snapshot*, 2015).

Sama seperti negara-negara kecil lain yang mendapat bantuan pinjaman lunak Tiongkok dalam jumlah yang besar sehingga diprediksi tidak bisa membayar hutang, Vanuatu termasuk salah satu dari negara kecil tersebut. Hal ini tentu berimbas pada adanya kemungkinan Vanuatu akan jatuh dalam jerat hutang Tiongkok dan besar kemungkinan dapat diintervensi dalam tiap pengambilan kebijakan strategis negara tersebut.

Tabel 3. 4 Tingkat Ancaman Tiongkok terhadap Australia di negara kawasan Pasifik Selatan

Negara	Tingkat Ancaman (<i>The Level of Threat</i>) Tiongkok	Respons dan Kebijakan Australia
Fiji	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak tanpa ada upaya intervensi paska kudeta 2006 - Lahirnya kebijakan '<i>look north policy</i>' - Upaya pendanaan Tiongkok atas kamp militer Blackrock - Inisiasi <i>BRI</i>, pembangunan infrastruktur pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Lobi dan intervensi untuk memenangkan proyek kamp militer Blackrock dari tangan Tiongkok - Peningkatan hubungan diplomatik melalui <i>Join Boarding Operation Australia-Fiji</i>
Negara	Tingkat Ancaman (<i>The Level of Threat</i>) Tiongkok	Respons dan Kebijakan Australia
Kepulauan Cook	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima bantuan ekonomi, pinjaman lunak dan pembangunan infrastruktur sebesar 33 juta USD (2006-2013) - Proyek Te Mato - Inisiasi <i>BRI</i>, pembangunan pelabuhan di Pulau Penhryn, jalan tol dan dermaga di Niue 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik - Pemberian hibah dan bantuan ekonomi
Kepulauan Marshal	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik untuk mencapai <i>One China Policy</i> - Pengaruh para pebisnis Tiongkok dalam esekutif pemerintah Marshal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik
Samoa	<ul style="list-style-type: none"> - Di izinkan oleh Samoa membangun kedutaan Tiongkok sejak Perang Dingin - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak sebesar 145,6 juta USD untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur - Inisiasi <i>BRI</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik melalui kunjungan Menteri Australia ke Samoa - Memberikan bantuan ekonomi sebesar 242,6 juta USD (2006-2013) dan masih berlanjut hingga saat ini.

Kepulauan Solomon	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan ekonomi dan pinjaman lunak hingga 500 juta USD paska Ramsi - Inisiasi <i>BRI</i>, dukungan Solomon bagi kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik melalui kunjungan PM Scott Morison - Peningkatan jumlah bantuan ekonomi dan hibah - Memenangkan proyek kerja sama pembangunan kabel telekomunikasi dari Tiongkok di Kepulauan Solomon
Tonga	<ul style="list-style-type: none"> - Alih dukungan terhadap <i>One China Policy</i> - Pinjaman sebesar 172 juta USD dengan bunga yang rendah - Imigran Tiongkok berdatangan paska jual beli Passport Tonga - Inisiasi <i>BRI</i>, keringanan pembayaran hutang sebesar 65 juta USD 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik dan pemberian dana bantuan ekonomi hingga 180 juta USD untuk peningkatan pembangunan infrastruktur
Vanuatu	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya membentuk dukungan <i>One China Policy</i> di Vanuatu - Upaya kerja sama dalam membangun pangkalan militer - Memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman lunak serta pembangunan infrastruktur sebesar 243 juta USD - Inisiasi <i>BRI</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hubungan diplomatik diperkuat - Kunjungan Menlu Australia Julie Bishop bersama Pangeran Charles